

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional tercermin dari perkembangan perekonomian ruang lingkup terkecilnya, yaitu perekonomian desa. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menumbuhkan perekonomian. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk pendanaan. Menurut Karuniawan, dkk. (2017), lembaga keuangan yang saat ini ada di masyarakat, antara lain adalah bank sentral, bank umum, perusahaan asuransi, pegadaian, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan lainnya. Khusus bagi masyarakat pedesaan di Provinsi Bali, telah terbentuk lembaga keuangan untuk meningkatkan perekonomian desa. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 tertanggal 1 November 1984, dibentuk suatu lembaga keuangan yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di daerah Bali yang dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan dan dalam memecahkan masalah kelangkaan permodalan dan mobilitas dana masyarakat untuk dikembangkan guna meningkatkan usaha golongan ekonomi lemah yang banyak terdapat di pedesaan.

Kabupaten Gianyar, sebagai salah satu kabupaten yang berada dalam Propinsi Bali, merupakan daerah yang mengedepankan perekonomian masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya LPD yang tersebar di

kabupaten tersebut. Secara umum, LPD di Kabupaten Gianyar telah mampu membantu mendorong perekonomian krama desa. Namun, di sisi lain, tidak semua LPD di Kabupaten Gianyar mengalami kondisi yang diinginkan. Terdapat beberapa LPD yang sudah tidak aktif/tidak beroperasi lagi. Salah satu penyebab menurunnya tingkat keberlangsungan LPD adalah rendahnya kualitas laporan keuangan. Hal yang sama terjadi pada LPD Pacung, Kelurahan Bitera, Kabupaten Gianyar, dimana terdapat kecurangan berupa penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum LPD. Hal ini membuat laporan keuangan yang disajikan tidak *reliable*. Adanya manipulasi data pada laporan keuangan menyebabkan terjadinya selisih antara saldo kas tercatat dengan saldo kas yang sebenarnya. Kejadian ini mengakibatkan kerugian LPD, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, hingga Rp 142.928.523 dan LPD tersebut tidak dapat beroperasi (Miasa, 2019).

Kasus tersebut membuktikan bahwa sangat penting bagi LPD untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Adapun beberapa faktor yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu tingkat pemahaman akuntansi, profesionalisme, penerapan sistem informasi akuntansi (SIA), dan peran pengawas internal.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat pemahaman akuntansi. Menurut Winkel dan Mukhtar (2004) dalam Sudaryono (2012:44), pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pasal 1

menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Jadi, tingkat pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik (Suari, 2019). Menurut Nudilah (2016), dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik maka, kualitas laporan keuangan perusahaan akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2015), tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Pradiska (2018) yang mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah profesionalisme. Menurut Krisnawati (2019), profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan dan latihan yang khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas - tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya. Seseorang yang bekerja secara profesional cenderung memiliki motivasi yang kuat dan selalu berpedoman pada etika. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang profesional terlaksana dengan cermat, sehingga *output* yang dihasilkan akan berkualitas. Hasil penelitian Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil

tersebut bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2019) yang menemukan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Menurut Bodnar dan William (2006:3), SIA merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi akuntansi tertuang dalam laporan keuangan. Penerapan SIA yang baik akan memudahkan dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2019), penerapan SIA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yanti (2020) yang memperoleh hasil bahwa penerapan SIA tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah peran pengawas internal. Sama halnya seperti lembaga keuangan lainnya, LPD juga memiliki pengawas internal. Pengawas internal yang ada di LPD bernama Badan Pengawas. Badan pengawas berperan penting dalam kemajuan suatu LPD. Menurut Sudiartini (2017), peran badan pengawas sangat strategis, selain sebagai auditor internal yang bertugas untuk mengawasi jalannya kebijakan dan pengelolaan LPD, juga menjadi *partner* kerja yang efektif untuk kemajuan LPD. Penelitian yang dilakukan Pradiska (2018) menunjukkan bahwa peran pengawas internal berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut bertolakbelakang dengan penelitian Septiana (2017) yang menemukan peran pengawas internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Profesionalisme, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Peran Pengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar?
- 2) Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar?
- 3) Apakah penerapan SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar?
- 4) Apakah peran pengawas internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh penerapan SIA terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, profesionalisme, penerapan SIA, dan peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kabupaten Gianyar, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil topik yang sejenis.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen LPD sebagai pertimbangan untuk langkah selanjutnya agar lebih profesional, terutama dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Zuliarti (2012), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik usaha/pemegang saham), dimana tanggung jawab antara kedua belah pihak tersebut diatur dalam sebuah kontrak kerja. Agen bertanggungjawab untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal, sedangkan prinsipal bertanggungjawab untuk memberikan imbalan kepada agen.

Menurut Sambera dan Meiranto (2013), masing-masing pihak dalam hubungan keagenan mempunyai kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham menginginkan keuntungan atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan, sedangkan manajemen menginginkan kompensasi atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Konflik kepentingan terjadi karena agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal. Selain itu, dalam hubungan keagenan juga dapat timbul asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dan pemegang saham perusahaan. Hal ini karena pihak manajemen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di

masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Penyampaian laporan keuangan akan dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajemen dan pemegang saham, karena laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal perusahaan.

Begitu pula pada LPD, pihak manajemen (pengurus) LPD membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas kinerja LPD dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan pada teori keagenan, informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus LPD selaku pihak agen berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada anggota LPD, yaitu desa pekraman selaku prinsipal bahwa LPD dapat mengelola dana yang ditanamkan dengan baik. Laporan keuangan juga sebagai sumber informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan LPD. Kualitas laporan keuangan menjadi hal yang diutamakan dalam rangka menjaga kepercayaan pihak prinsipal.

2.1.3 Tingkat Pemahaman Akuntansi

Menurut Winkel dan Mukhtar (2004) dalam Sudaryono (2012:44), pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasi, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Menurut Yanti (2018), seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti dan pandai bagaimana

proses akuntansi sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang mengerti benar tentang akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik (Suari, 2019). Adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan andal maka kualitas laporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri (Nudilah, 2016).

2.1.4 Profesionalisme

Istilah profesionalisme berasal dari kata profesi yang memiliki arti suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, mencakup ilmu pengetahuan, keterampilan dan metode. Profesional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Menurut Krisnawati (2019), profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan dan latihan khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, profesionalisme adalah suatu sikap dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu sesuai dengan profesi yang digeluti dan selalu berpedoman pada etika.

Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang memberi karakteristik suatu profesi. Seorang yang profesional cenderung dipercaya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini tentu membuat pekerjaan yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, sehingga mendatangkan hasil yang sesuai dengan harapan. Begitupun dengan seorang *accounting*. *Accounting* yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. *Accounting* yang menjalankan tugas profesi dengan sungguh-sungguh maka kinerjanya akan optimal (Pratiwi, 2021).

2.1.5 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut Bodnar dan William (2006:3), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses dan mengomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Adapun tujuan SIA dalam perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen.

Kepengurusan merujuk kepada tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya kepada pemakai eksternal melalui laporan keuangan. Secara internal, pihak manajemen

memperoleh informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban.

- 2) Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan informasi bagi pemakai untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
- 3) Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sistem informasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan khususnya dalam proses arus informasi akuntansi.

2.1.6 Peran Pengawas Internal

LPD sebagai lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pengawasan. Sesuai dengan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 11, yang dimaksud dengan pengawas internal adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelola LPD. Divisi audit pada LPD adalah Badan Pengawas Internal, yang disebut Badan Pengawas Desa. Secara kelembagaan, badan pengawas internal harus memahami elemen pengendalian. Adapun elemen pengendalian tersebut, yaitu:

- 1) Evaluasi Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

- 2) Evaluasi Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisien, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan.

3) Evaluasi Proses *Governance*

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan, dan selain itu audit intern harus mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas dari kegiatan, program, dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika.

Tugas dari Badan Pengawas LPD adalah:

- 1) Mensosialisasikan keberadaan LPD.
- 2) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD.
- 3) Mengawasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah.
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik atau terjadwal serta identitas sesuai dengan program kerja badan pengawas.

Seorang pengawas LPD memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Bertanggungjawab atas terlaksananya rencana program bidang pengawasan.
- 2) Bertanggungjawab terhadap peningkatan kinerja personalia bidang pengawasan.
- 3) Bertanggungjawab berkembangnya aset yang dimiliki oleh LPD.

- 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan standar operasional dan prosedur bidang pengawasan.
- 5) Bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional bidang pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pengawas internal adalah badan pengawas LPD, dimana sebagai auditor internal yang bertugas untuk mengawasi jalannya kebijakan dan pengelolaan LPD. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus LPD akan diperiksa oleh badan pengawas internal LPD selaku pihak auditor internal, sehingga laporan keuangan yang disajikan berkualitas serta bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2016:105), laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) yang tertuang dalam PSAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas kegiatan operasional perusahaan.

Sebagai lembaga keuangan, LPD juga menyusun laporan keuangan. Menurut Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang lembaga perkreditan desa, laporan keuangan yang dihasilkan LPD, yaitu:

- 1) Laporan bulanan

(1) Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman

Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman adalah laporan yang menggambarkan kegiatan LPD pada bulan yang bersangkutan yang meliputi; (1) potensi/sumber daya; (2) perkembangan pinjaman yang diberikan; (3) antarbank aktiva; (4) tabungan dan deposito masyarakat dan (5) antarbank pasiva serta rinciannya.

(2) Laporan neraca

Laporan neraca berisikan informasi tentang jumlah aktiva sesuai dengan pos-pos aktiva dan jumlah pasiva sesuai dengan pos-pos pasiva pada periode bulan laporan.

(3) Laporan perhitungan laba rugi

Laporan laba-rugi berisikan informasi mengenai jumlah pendapatan sesuai pos-pos pendapatan LPD, biaya/belanja sesuai dengan pos-pos biaya dan perhitungan laba/rugi sampai periode bulan laporan.

2) Laporan tiga bulanan

(1) Laporan penilaian kesehatan LPD

Laporan penilaian kesehatan LPD berisikan informasi mengenai rasio, nilai kredit masing-masing komponen dan nilai kesehatannya.

(2) Laporan penilaian peringkat risiko LPD

Laporan penilaian peringkat risiko LPD berisikan informasi mengenai rasio yang dicapai, bobot, *score penalty* dan peringkat risiko masing-masing komponen yang dinilai.

3) Laporan tahunan

- (1) Laporan rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja LPD (RK-RAPB)

Rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja LPD (RK-RAPB) disusun oleh pengurus, dibahas dan disetujui dalam paruman desa pakraman serta disyahkan oleh bendesa.

- (2) Laporan pertanggungjawaban pengurus akhir tahun.

Setiap tahun pengurus LPD wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan LPD yang disampaikan kepada krama desa melalui paruman desa pakraman selaku pemilik LPD.

- (3) Laporan hasil pertanggungjawaban audit pengawas internal.

Setiap tahun LPD wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengawasan LPD yang disampaikan kepada krama desa melalui paruman desa.

Laporan keuangan hendaknya memiliki kualitas yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas akan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan. Adapun karakteristik yang merupakan syarat laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas, antara lain sebagai berikut:

- 1) Relevan

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Informasi yang relevan, yaitu:

- (1) Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- (2) Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil data lalu dan kejadian masa kini.
- (3) Tepat waktu, yaitu informasi disajikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- (4) Lengkap, yaitu informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2) Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, seta dapat diverifikasikan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari

satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan dan tidak berbeda jauh.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan artinya informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

(1) Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam 1 tahun.

(2) Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (antar entitas).

4) Dapat dipahami

Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas kegiatan operasional LPD.

2.1.8 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut

LPD adalah lembaga keuangan milik desa pakraman yang berkedudukan di wewidangan desa pakraman. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, LPD terbentuk karena adanya prinsip otonomi daerah, dimana provinsi, kabupaten, dan kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LPD merupakan badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba/keuntungan. Keuntungan yang diperoleh ini akan dialokasikan untuk cadangan modal enam puluh persen (60%), dana pembangunan desa adat dua puluh persen (20%), jasa produksi sepuluh persen (10%), dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan lima persen (5%), dan dana sosial lima persen (5%). Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus yang bertanggungjawab kepada krama desa. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang dapat dilakukan LPD, antara lain:

- 1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.
- 2) Memberantas gadai gelap dan sejenisnya.
- 3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
- 4) Meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran serta peredaran uang di desa.

- 5) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank Pembangunan Daerah dengan imbalan bunga bersaing dengan pelayanan yang memadai.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini disusun berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Pratiwi (2021) meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, profesionalisme dan etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Marga. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, profesionalisme dan etika kepemimpinan, sedangkan variabel yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme dan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Marga.

Pebriantari (2021) meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Gianyar. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan variabel yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan

teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Gianyar.

Priyani (2020) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kota Denpasar. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kota Denpasar.

Krisnawati (2019) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, profesionalisme, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kabupaten Badung. Variabel independen yang digunakan adalah etika kepemimpinan, profesionalisme, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika

kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Suardana (2019) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, audit internal, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada hotel berbintang di Kecamatan Ubud. Variabel bebas yang digunakan adalah etika kepemimpinan, audit internal dan sistem informasi akuntansi, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan, audit internal dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada hotel berbintang di Kecamatan Ubud.

Suari (2019) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Gianyar. Variabel bebas yang digunakan adalah etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan terikat yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan LPD di Kabupaten Gianyar.

Dewi (2018) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. Variabel bebas yang digunakan adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan variabel yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas, pendidikan dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan LPD di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.

Pawitrani (2018) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Variabel independen yang digunakan adalah etika kepemimpinan, audit internal dan sistem informasi akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kecamatan Kerambitan.

Permatasari (2018) meneliti tentang pengaruh efektivitas audit operasional, pengendalian internal, dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. Variabel bebas yang digunakan adalah efektivitas audit operasional, pengendalian internal, dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas audit operasional, pengendalian internal, dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

Putra (2018) meneliti tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Klungkung. Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengendalian intern, komitmen organisasi, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung.

Pradiska (2018) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas internal dan tingkat pemahaman akuntansi, keahlian profesional terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kabupaten Badung. Variabel bebas yang digunakan adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas internal, tingkat pemahaman akuntansi dan keahlian profesional, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kabupaten Badung, sedangkan tingkat pemahaman akuntansi dan keahlian profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kabupaten Badung.

Yanti (2018) meneliti pengaruh etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas, tingkat pemahaman akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kota Denpasar. Variabel independen yang digunakan adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, tingkat pemahaman akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan

pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Basar (2017) meneliti tentang pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Gowa. Variabel independen yang digunakan adalah kepemimpinan dan pengetahuan aparat, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan profesionalisme dan pengetahuan aparat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Gowa.

Nudilah (2016) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kota Denpasar. Variabel independen yang digunakan adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kota Denpasar, sedangkan fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kota Denpasar.

Purwanti (2015) meneliti tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

